

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia group, Jakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bachsani Mustafa, 1882, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Pamulang.
- Fanggidea, Abraham. Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial, Puspa Swara, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya. Bandung.
- Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, Tedi, 2017, Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan,
Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Yudhianto, Kresna Agung, 2022, Hukum Perlindungan Anak Dan KDRT,
Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang

Asonian.

Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pembinaan Anak Jalanan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Walikota Padang No. 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Padang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

3. Jurnal

Abdul Rasyid, Popy Sri Jelita, “*Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Kota Padang Sumatera Barat*”, : Indonesian Journal of School Counseling, Volume 3 No.1, 2019.

Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “*Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)*”, Volume 32, Nomor 1, Februari 2020.

Arie Ardiwijaya , Wiranta Yudha Ginting, dan Layung Paramesti Martha “*Analisis Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Bogor*” Volume 4, nomor 1, April 2020.

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, Jumal Pro Justitia Universitas Parahyangan Bandung, Vol. IV No. 1 Tahun 2000.

Cindy Dwi Yanti, Sarbaitinil, Ikhsan Muharma Putra, *“Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum”*, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.

Departemen Sosial RI, *“Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan”*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.

Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, *“Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan”*, Vol. 2 No. 1, 2015.

Fikriryandi Putra, Dessy Hasanah Siti A., & Eva Nuriyah Hidayat, *“Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah”*, Social Work Journal, Vol 5, No 1 2015.s

Fransiska Novita Eleanora, Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, *“Keberadaan Rumah Singgah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan”*, Jatiswara, Vol. 35 No. 3 November 2020.

Jakob Tobing, *“ Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*, Vol. 007, Februari 2018.

Mustamu, Julista. *3Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,*” Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Sheilla Chairunnisyah Sirait, *“ Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ”*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Sufriadi, *“Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.

Syam Fathurrachmanda , Suryadi , Ratih Nur Pratiwi, Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang), Wacana– Vol. 16, No. 4, 2013, Hlm 217.

T. Mulya Maulinda, Ubaidullah, *“Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Uud 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara”*, Volume 4, Nomor 4, 2009.

4. Website

Dunia Anak Jalanan <http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id/>, Diakses Pada 1 November 2022. Pukul 13:18 WIB

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 45”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses pada, 25 Oktober 2022

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial <https://www.kemsos.go.id/content/tugas-fungsi> , diakses pada Jumat, 11 Januari 2022, pukul 16.52 WIB

Satpol PP gelar razia bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan. <https://sumbar.poskota.co.id/2022/10/06/jadi-pengemis-satpol-pp-jaring-8-anak-jalanan-di-kota-padang> , diakses pada Kamis, 11 November 2022, pukul 20.15 WIB

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padang, <https://dinsos.padang.go.id/> , Diakses

Pada 19 November 2022, Pukul 22:00 WIB.

